

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 ditemukan Virus Corona atau Covid-2019 pertama kali di Wuhan, China. Vaksin itu belum didapati sampai saat ini sehingga tidak bisa terkendali. Dari dunia tercatat 200 lebih negara telah mengabarkan adanya Covid 19. Awal mula di Indonesia kasus teridentifikasi di Depok, Jawa Barat pada bulan Maret 2020. Pada bulan Maret 2020 beberapa masyarakat telah dilaporkan positif covid 19 telah sampai 1.156 serta 103 di antaranya dinyatakan meninggal. Sebaran Covid 19 yang cukup cepat, ini karena mayoritas masyarakat tidak mematuhi serta mentaati seruan pemerintah baik pusat maupun daerah. Meskipun telah diinstruksikan untuk seluruh masyarakat agar menerapkan *social distancing*. Tingkat penularan akan semakin tinggi jika seruan tersebut belum dapat ditaati oleh seluruh masyarakat.

Virus corona atau Covid-19 ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut dengan WHO termasuk kedalam wabah penyakit sehingga perlu melakukan usaha pencegahan agar tidak terjadi peningkatan kasus (Kemenkes RI, 2020). Dalam usaha pencegahan yang dilakukan dengan menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan (*UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan – JDIH BSSN*, 2018). Proteksi terhadap kesehatan seluruh masyarakat dari wabah dengan menyelenggarakan karantina ialah keharusan yang dilakukan bersama baik

Pemerintah (pusat atau daerah) tidak terkecuali masyarakat dari segala sesuatu serta penyebab dan resiko bagi kesehatan seluruh masyarakat yang mana akan mengakibatkan perihal darurat. Tindakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ditempuh sebagai bentuk kekarantina kesehatan, selain itu juga dengan melaksanakan kegiatan peninjauan (pengamatan) penyakit serta penyebab dan resiko kesehatan seluruh masyarakat.

Mendahsyatnya sebaran Covid-19 di Indonesia sekarang ini ditandai banyaknya persoalan yang terjadi serta tingkat kematian. Penambahan kasus covid 19 berakibat pada berbagai bidang baik itu bidang sosial budaya, ekonomi, perpolitikan, pertahanan dan keamanan di Indonesia, sehingga saat ini dibutuhkan penindakan secara cepat terhadap Covid-19 guna menurunkan atau mengurangi penularan *virus corona* atau Covid-19 yang semakin meluap-luap (Hukumklik, 2020). Kegiatan yang dilakukan meliputi dibatasinya beberapa kegiatan-kegiatan pada masyarakat di lokasi yang terduga kejangkitan Covid-19 (Kemenkes RI, 2020). Terbatasnya kegiatan yang ada nampak pada kegiatan belajar di sekolah serta pekerjaan-pekerjaan yang beralih memanfaatkan online, tidak hanya itu saja keterbatasan pada hal-hal berbau keagamaan juga diterapkan, terutama di tempat dan fasilitas umum.

Mengenai hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lamongan sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor : 903/ 380 /413.202/2020 mengenai Mekanisme Penggunaan, Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Guna Mempercepat Penanganan Covid-19. Memperhatikan perkembangan penularan Covid-19

yang semakin meluas, Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah ditetapkan bahwasannya adanya status Tanggap Darurat melalui Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/163/KEP/413.013/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Sebagai langkah penangkalan dan pengendalian bencana non alam tersebut, perlu dilakukan kebijakan percepatan dengan melakukan refocussing program dan kegiatan yang ditujukan guna penangkalan dan pengendalian Covid-19 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah.

Fungsi dan tugas yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan antara lain ialah : a) Membuat rumusan peraturan di bidang perikanan; b) Melayani masyarakat di bidang perikanan; c) Melakukakan pengarahannya pada bidang perikanan dan pemeliharaan berupa binaan yang dilakukan dari pertama sampai selesai; d) Menyelenggarakan kegiatan budidaya ikan, pemberdayaan nelayan, perlindungan, petambak garam yang masih dalam batas kekuasaan daerah; e) Menyelenggarakan pengelolaan pesisir, pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan sesuai kekuasaan daerah.

Mewabahnya pandemi Covid 19 secara global pada berbagai negara tujuan ekspor, berimbas terhadap kelangsungan hidup sejumlah perusahaan pengeksportir ikan di pesisir Pantai Utara Jawa Timur. Selain harga ikan laut terus menurun tajam, beberapa eksportir ikan terpaksa memilih menutup usahanya, karena ketidakmampuan beban biaya operasional yang telah

dikeluarkan. Keadaan ini dialami pelaku usaha eksportir ikan dan para nelayan di pantai utara. Kendati harga ikan laut turun drastis akibat dampak wabah corona, sebagian nelayan tetap memilih melaut demi memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sebagian nelayan lain, memilih tidak melaut dan beralih menjadi pengepul, sambil menunggu harga ikan stabil kembali. Para nelayan mengungkapkan, hasil dari penjualan ikan tangkapan tidak sebanding dengan biaya operasional yang telah dikeluarkan nelayan, mulai dari bahan bakar solar hingga perbaikan alat tangkap. Pendapatan nelayan di pesisir pantai utara dirasakan terus merosot, sejak peningkatan kasus wabah COVID-19 pada tahun 2020.

“Keadaan ini diperparah dengan sepi pembeli yang datang ke tempat pelelangan ikan (TPI) akibat penerapan physical distancing oleh pemerintah. Konsumen yang biasanya ramai memadati TPI, kini dilarang datang karena adanya wabah virus corona. Nasib nelayan kian terpuruk, setelah perusahaan ekspor memilih tutup dan tidak menerima pasokan ikan dari nelayan, lantaran negara tujuan ekspor juga menutup akses karena pandemi global COVID-19”.

Bedasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, menunjukkan bahwasannya ada sebuah penanganan terkait perekonomian masyarakat nelayan di pesisir pantai utara kabupaten Lamongan di tengah pandemi covid-19 ini. Dilihat dari permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji ialah bagaimana perekonomian masyarakat nelayan tetap stabil serta peran Dinas Perikanan dalam mengambil kebijakan terhadap nelayan ketika terjadi pandemi covid-19 di tahun 2020. Kini para nelayan berharap

ada solusi dari pemerintah daerah maupun pusat, agar roda perekonomian nelayan tetap berjalan di tengah wabah corona di tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Perikanan dalam meningkatkan perekonomian para nelayan di pesisir pantai utara kabupaten lamongan pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 ?
2. Apa faktor penghambat serta pendukung Dinas Perikanan dalam meningkatkan perekonomian para nelayan di pesisir pantai utara Kabupaten Lamongan pada masa pandemi covid 19 tahun 2020 ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Guna memahami serta mengerti mengenai peran Dinas Perikanan dalam meningkatkan perekonomian para nelayan di pesisir pantai utara kabupaten lamongan ketika sedang terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020.
2. Untuk memahami serta mengerti faktor-faktor penghambat dan pendukung Dinas Perikanan dalam meningkatkan perekonomian para nelayan di pesisir pantai utara Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang terdapat dalam penelitian yang saat ini dilaksanakan peneliti sedikitnya terdapat 1 (satu) hal yang mendasar

sehingga dapat berkontribusi secara teori, yaitu teori peran. Maka peneliti melakukan pengembangan pada teori yang telah ada guna memberikan deskripsi yang sesuai dengan penelitian ini yaitu mengenai Peran Dinas Perikanan dalam menangani perekonomian masyarakat nelayan ditengah-tengah wabah Covid-19 Tahun 2020.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat membawa manfaat kepada masyarakat nelayan, serta Progam Sarjana Ilmu Pemerintahan, dan tidak terkecuali untuk peneliti.

a. Bagi Masyarakat Nelayan

Guna dapat memberi dedikasi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan sebagai tumpuan untuk meningkatkan perekonomian ditengah pandemi covid-19 tahun. Untuk mengembangkan pengetahuan khususnya mengenai pemanfaatan potensi Perikanan di Kabupaten Lamongan.

b. Bagi Dinas Perikanan

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam menentukan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan. Sebagai sumbangan pemikiran yang nyata bagi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan kinerja serta mengembangkan potensi Perikanan dalam meningkatkan Perekomian masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Lamongan.

c. Bagi Progam Sarjana Ilmu Pemerintahan

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian Ilmu Pemerintahan UNIM Mojokerto.

d. Bagi Peneliti

Sebagai kewajiban pemenuhan tugas akhir (skripsi) pada program Sarjana Ilmu Pemerintahan.